



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfotapin@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 1 Huruf G Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk PPTK-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a pertimbangan ini perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756)
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

9. Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk PPTK-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini yang dibiayai dari dana APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;

KEDUA

: Memberikan Tugas dan Wewenang :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
4. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
5. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA
7. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi
8. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas
DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Inspektur Kabupaten Tapin
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
4. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Diskominfo Kab. Tapin

PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN/ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) UNTUK APBD KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS		N A M A / N I P	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA
1	2		3	4	5
1.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sub dan	Agus Setiawan Marwan, SE 19760817 201101 1 006	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
2.	Kepala Bagian Keuangan	Sub	Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi 19760605 200701 2 040	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD APBD APBD
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
3.	Kepala Bagian dan Kepegawaian	Sub Umum	Rika Krisnawati, ST 19830828 200701 2 003	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD

			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD APBD APBD
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Umar Faisal, S.Sos 19680618 198803 1 006	Program Informasi dan Komunikasi Publik. 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik - Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Pelayanan Informasi Publik - Layanan Hubungan Media - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	APBD APBD APBD APBD APBD APBD
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Hasran Noor, SE, SH 19661120 199303 1 004	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	APBD APBD APBD APBD

6.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Norbaitina, S.Sos	- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	APBD
			- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	APBD
			- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem dan SPBE	APBD
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.	
			1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	APBD
			- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	APBD
			- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	APBD
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	APBD
			- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD
			2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			- Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD



WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005